



**LAPORAN
AKUNTABILITAS
INSTANSI
PEMERINTAH (LKIP)
DPMPTSP KOTA BOGOR
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Berkat rahmat dan karunia Allah SWT, maka kami telah menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor Tahun 2021.

Tujuan penyusunan LKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor Tahun 2021 ini adalah sebagai Laporan Pertanggung jawaban kegiatan selama 1 (satu) tahun yang merupakan perwujudan komitmen Pimpinan dan Seluruh Staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor. Laporan ini menyajikan keberhasilan dan ketidak berhasilan program dan kegiatan serta evaluasinya. Dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor pada Tahun 2021.

Disadari sepenuhnya bahwa LKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor ini tentunya masih jauh dari sempurna baik materi maupun penyajiannya.

Dengan demikian segala kritik maupun saran demi perbaikan LKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor ini sangat kami harapkan.



Bogor, Februari 2022

Kepala,

Drs. Firdaus, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19671226 198603 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah salah satu kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasinya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan menggunakan tata cara tertentu dan dilakukan secara berkala.

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang telah dijabarkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kerja. Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan harus mempertimbangkan visi misi serta dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran lingkup Kota, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya tata pemerintahan yang baik dan akuntabel adalah harapan semua pihak. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan akuntabel diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan berlangsung secara berdaya guna, berhsil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Untuk hal tersebut Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). LKIP merupakan bentuk akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang terukur melalui pencapaian kinerja, Visi, Misi, realisasi pencapaian, indicator utama dan sasaran dari target yang telah ditetapkan.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Bogor Nomor 164 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Jabatan Struktural Di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah di Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal. Adapun fungsinya adalah :

1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Pelaksanaan teknis operasional di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang melaksanakan tugas dengan dibantu oleh :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 2. Kelompok Substansi Keuangan ;
 3. Kelompok Substansi Perencanaan dan Pelaporan .
3. Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal; dan:
4. Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu:

a. Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Aparatur merupakan unsur yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut. Secara kuantitatif, DPMPTSP memiliki pegawai yang cukup memadai, yaitu sebanyak 64 orang, terdiri dari 41 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 25 orang pelaksana/Non PNS, dengan ringkasan sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai berdasarkan Status Kepegawaian

| No. | Status Kepegawaian | Jabatan | Jumlah |
|-------|--------------------|---|--------|
| 1. | ASN (PNS) | Kepala Dinas | 1 |
| | | Sekretaris | 1 |
| | | Analisis Kebijakan Madya | 4 |
| | | Kepala Subag | 1 |
| | | Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Muda | 1 |
| | | Perencana Ahli Muda | 1 |
| | | Analisis Kebijakan Ahli Muda | 10 |
| | | Pranata Humas Ahli Muda | 1 |
| | | Pranata Komputer Ahli Muda | 1 |
| | | JFU | 20 |
| 2. | Honorer | Pengemudi | 1 |
| 3. | Outsourcing | CS/FO | 7 |
| | | IT | 5 |
| | | Security | 5 |
| | | OB | 5 |
| TOTAL | | | 64 |

Sumber : Simpeg Kota Bogor, 2022

Dalam menyelenggarakan pelayanan masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai pelaksana teknis Pemerintah Kota Bogor, selain kuantitas jumlah sumber daya manusia yang harus memadai juga dibutuhkan kualitas Sumber Daya Manusia yang mencukupi diukur dari pengalaman kerja, tingkat pendidikan, maupun keahliannya

untuk mendukung kemampuan pelaksanaan tugas setiap Aparatur Pemerintah Daerah.

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

| No | Pendidikan | Sumber Daya Manusia | | | |
|-------|------------|---------------------|---------|-------|-----|
| | | PNS | Non PNS | Total | (%) |
| 1 | S3 | | | | |
| 2 | S2 | 17 | - | 17 | |
| 3 | S1 | 14 | 10 | 24 | |
| 4 | Diploma 3 | 2 | 3 | 5 | |
| 5 | SLTA | 8 | 12 | 20 | |
| TOTAL | | 41 | 25 | 64 | 100 |

Sumber : Simpeg Kota Bogor, 2022

Berdasarkan kemampuan dan pengalaman pegawai maka dapat dilihat distribusi pegawai berdasarkan pangkat dan golongan, sebagai berikut:

Tabel 1.3 Jumlah Pegawai berdasarkan golongan

| No. | Golongan / Ruang | Jumlah | (%) |
|-------|-------------------------------|--------|-----|
| 1. | Pembina utama Muda (IVc) | 1 | |
| 2 | Pembina Tingkat I (IV/b) | 1 | |
| 3 | Pembina (IV/a) | 11 | |
| 4 | Penata Tingkat I (III/d) | 10 | |
| 5 | Penata (III/c) | 5 | |
| 6 | Penata Muda Tingkat I (III/b) | 5 | |
| 7 | Penata Muda (III/a) | 2 | |
| 8 | Pengatur Tingkat I (II/d) | 7 | |
| 9 | Pengatur (IIc) | - | |
| | Non PNS | 23 | |
| TOTAL | | 64 | 100 |

Sumber : Simpeg Kota Bogor, 2022

Sumber Daya Manusia merupakan faktor yang sangat penting dalam suatu organisasi. Jalannya roda suatu organisasi sangat tergantung pada kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang ada didalamnya. Untuk mengoptimalkan Pelayanan di DPMPTSP Kota Bogor, dibutuhkan Sumber Daya Manusia, yang disesuaikan dengan standar kompetensi yang sesuai dengan tugas dan jabatan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas pelayanan pada DPMPTSP Kota Bogor dapat digambarkan dalam Tabel berikut ini :

Tabel 1.4 Rencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor

| No | Nama Jabatan | Jumlah Kondisi SDM Saat Ini (s.d Semester 1 Tahun 2022) | | | Jumlah Kebutuhan SDM s.d Tahun 2024 | | Jumlah Pemenuhan SDM s.d Tahun 2024 | |
|-------|---|---|-----|---------|-------------------------------------|-----|-------------------------------------|-----|
| | | PNS | P3K | Non PNS | PNS | P3K | PNS | P3K |
| 1 | Kepala | 1 | - | - | 1 | - | | - |
| 2 | Sekretaris | 1 | - | - | 1 | - | | - |
| 2.1 | Perencana Ahli Muda | 1 | - | - | 1 | - | | - |
| 2.1.1 | Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan | 1 | - | - | 1 | - | | - |
| 2.1.2 | Pengelola Bahan Perencanaan dan Pelaporan | - | - | - | 1 | - | | - |
| 2.2 | Kasubag Umum dan Kepegawaian | 1 | - | - | 1 | - | | - |
| 2.2.1 | Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur | 1 | - | - | 1 | - | | - |
| 2.2.2 | Pengadministrasian Umum | 0 | - | - | 2 | - | | - |
| 2.2.3 | Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah | 2 | - | - | 2 | - | | - |
| 2.2.4 | Pengelola Rumah Tangga | 1 | - | - | 1 | - | | - |
| 2.3 | Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda | 1 | - | - | 1 | - | | - |

| No | Nama Jabatan | Jumlah Kondisi SDM Saat Ini (s.d Semester 1 Tahun 2022) | | | Jumlah Kebutuhan SDM s.d Tahun 2024 | | Jumlah Pemenuhan SDM s.d Tahun 2024 | |
|------------|---|---|-----|---------|-------------------------------------|-----|-------------------------------------|-----|
| | | PNS | P3K | Non PNS | PNS | P3K | PNS | P3K |
| 2.3.1 | Bendahara | 2 | - | - | 2 | - | | - |
| 2.3.2 | Verifikator Data Laporan Keuangan | 0 | - | - | 1 | - | | - |
| 2.3.3 | Pengelola Keuangan | 1 | - | - | 1 | - | | - |
| 3 | Kelompok Substansi Penanaman Modal | 3 | - | - | 3 | - | | - |
| 3.1 | Sub Kelompok Substansi Pemantauan dan Regulasi Penanaman Modal | 1 | - | - | 1 | - | | - |
| 3.1.1 | Analisis Hasil Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat | 0 | - | - | 1 | - | | - |
| 3.1.2 | Pengelola Pengaduan Publik | 1 | - | - | 1 | - | | - |
| 3.2 | Sub Kelompok Substansi Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal | 1 | - | - | 1 | - | | - |
| 3.2.1 | Pengawas Penanaman Modal | 1 | - | - | 1 | - | | - |
| 3.2.2 | Pengolah Pemodal dan Investasi | 0 | - | - | 1 | - | | - |
| 3.3 | Sub Kelompok Substansi Pembinaan dan Kajian Penanaman Modal | 1 | - | - | 1 | - | | - |
| 3.3.1 | Analisis Pembinaan Kelembagaan Investasi | 0 | - | - | 1 | - | | - |
| 3.3.2 | Pengelola Data Pengembangan Investasi | 1 | - | - | 1 | - | | - |
| 3.4 | Sub Kelompok Substansi Fasilitasi dan Insentif | 1 | - | - | 1 | - | | - |
| 3.4.1 | Analisis Dokumen Perizinan | 0 | - | - | 1 | - | | - |
| 3.4.2 | Pengelola Dokumen Perizinan | 1 | - | - | 1 | - | | - |
| 3.5 | Sub Kelompok Substansi Potensi Penanaman Modal | 1 | - | - | 1 | - | | - |
| 3.5.1 | Analisis Dokumen Perizinan | 0 | - | - | 1 | - | | - |
| 3.5.2 | Pengelola Dokumen Perizinan | 1 | - | - | 1 | - | | - |
| 3.6 | Sub Kelompok Substansi Perencanaan Penanaman Modal | 1 | - | - | 1 | - | | - |
| 3.6.1 | Analisis Dokumen Perizinan | 1 | - | - | 2 | - | | - |
| 3.6.2 | Pengelola Dokumen Perizinan | 0 | - | - | 1 | - | | - |

| No | Nama Jabatan | Jumlah Kondisi SDM Saat Ini (s.d Semester 1 Tahun 2022) | | | Jumlah Kebutuhan SDM s.d Tahun 2024 | | Jumlah Pemenuhan SDM s.d Tahun 2024 | |
|------------|--|---|-----|---------|-------------------------------------|-----|-------------------------------------|-----|
| | | PNS | P3K | Non PNS | PNS | P3K | PNS | P3K |
| 3.7 | Sub Kelompok Substansi Promosi Penanaman Modal | 1 | - | - | 1 | - | | - |
| 3.7.1 | Penyusun Promosi dan Kerjasama | 1 | - | - | 1 | - | | - |
| 3.7.2 | Pranata Promosi | 0 | - | - | 1 | - | | - |
| 3.8 | Sub Kelompok Substansi Perencanaan dan Pengembangan Promosi | 1 | - | - | 1 | - | | - |
| 3.8.1 | Analisis Penanaman Modal | 0 | - | - | 1 | - | | - |
| 3.8.2 | Pengelola Pengembangan Investasi | 0 | - | - | 1 | - | | - |
| 3.9 | Sub Kelompok Substansi Pengelola Data dan Informasi | 1 | - | - | 1 | - | | - |
| 3.9.1 | Analisis Sistem Informasi dan Jaringan | 1 | - | - | 3 | - | | - |
| 3.9.2 | Pengelola Data | 1 | - | - | 1 | - | | - |
| 3.9.3 | Pengelola Teknologi dan Informasi | 0 | - | - | 2 | - | | - |
| 4 | Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 1 | - | - | 1 | - | | - |
| 4.1 | Sub Kelompok Substansi Pelayanan Penanaman Modal | 1 | - | - | 1 | - | | - |
| 4.1.1 | Analisis Dokumen Perizinan | 0 | - | - | 2 | - | | - |
| 4.1.2 | Pengelola Dokumen Perizinan | 0 | - | - | 1 | - | | - |
| 4.2 | Sub Kelompok Substansi Integrasi Pelayanan | 1 | - | - | 1 | - | | - |
| 4.2.1 | Analisis Tata Ruang | 2 | - | - | 3 | - | | - |
| 4.2.2 | Pengelola Pengendalian Pemanfaatan Ruang | 0 | - | - | 1 | - | | - |
| 4.3 | Sub Kelompok Substansi Konsultasi dan Pengaduan | 1 | - | - | 1 | - | | - |
| 4.3.1 | Analisis Tata Ruang | 2 | - | - | 3 | - | | - |
| 4.3.2 | Pengelola Pengendalian Pemanfaatan Ruang | 0 | - | - | 1 | - | | - |

Tabel 1.5 Rencana Kebutuhan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor

| No | Nama Jabatan | Jumlah SDM Yang Sudah Mengikuti Diklat (s.d semester 1 tahun 2022) | | | Rencana Jumlah SDM Yang Diusulkan Mengikuti Diklat (s.d Tahun 2024) | | |
|-------|---|--|------------|----------------|---|------------|----------------|
| | | Fungsional | Struktural | Teknis Lainnya | Fungsional | Struktural | Teknis Lainnya |
| 1 | Kepala | - | 1 | - | - | | - |
| 2 | Sekretaris | - | 1 | - | - | | - |
| 2.1 | Perencana Ahli Muda | - | - | - | - | 1 | - |
| 2.1.1 | Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan | - | - | - | - | | 1 |
| 2.1.2 | Pengelola Bahan Perencanaan | - | - | - | - | | 1 |
| 2.2 | Kasubag Umum dan Kepegawaian | - | 1 | - | - | | - |
| 2.2.1 | Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur | - | - | - | - | | 1 |
| 2.2.2 | Pengelola Rumah Tangga | - | - | - | - | | 1 |
| 2.2.3 | Pengadministrasi Umum | - | - | - | - | | 2 |
| 2.2.4 | Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah | - | - | 2 | - | | 2 |
| 2.3 | Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda | - | 1 | - | - | | - |
| 2.3.1 | Bendahara | - | - | - | - | | 2 |
| 2.3.2 | Verifikator Data Laporan Keuangan | - | - | - | - | | 1 |
| 2.3.3 | Pengelola Keuangan | - | - | - | - | | 1 |
| 3 | Kelompok Substansi Penanaman Modal | - | 1 | - | - | | - |
| 3.1 | Sub Kelompok Substansi Pemantauan dan Regulasi Penanaman Modal | - | 1 | - | - | - | - |
| 3.1.1 | Analisis Hasil Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat | - | - | - | - | | 3 |
| 3.1.2 | Pengelola Pengaduan Publik | - | - | - | - | | 1 |
| 3.2 | Sub Kelompok Substansi Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal | - | - | - | - | | 2 |
| 3.2.1 | Pengawas Penanaman Modal | - | 1 | - | - | | - |
| 3.2.2 | Pengolah Pemodal dan Investasi | - | - | - | - | | 1 |

| No | Nama Jabatan | Jumlah SDM Yang Sudah Mengikuti Diklat (s.d semester 1 tahun 2022) | | | Rencana Jumlah SDM Yang Diusulkan Mengikuti Diklat (s.d Tahun 2024) | | |
|------------|--|--|------------|----------------|---|------------|----------------|
| | | Fungsional | Struktural | Teknis Lainnya | Fungsional | Struktural | Teknis Lainnya |
| 3.3 | Sub Kelompok Substansi Pembinaan dan Kajian Penanaman Modal | - | - | - | - | | 1 |
| 3.3.1 | Analisis Pembinaan Kelembagaan Investasi | - | 1 | - | - | | - |
| 3.3.2 | Pengelola Data Pengembangan Investasi | - | - | - | - | | 1 |
| 6.4 | Sub Kelompok Substansi Fasilitas dan Insentif | - | - | - | - | | 1 |
| 3.4.1 | Analisis Dokumen Perizinan | - | 1 | - | - | | - |
| 3.4.2 | Pengelola Dokumen Perizinan | - | - | - | - | | - |
| 3.5 | Sub Kelompok Substansi Potensi Penanaman Modal | - | - | - | - | | 1 |
| 3.5.1 | Analisis Dokumen Perizinan | - | - | - | - | | 1 |
| 3.5.2 | Pengelola Dokumen Perizinan | - | 1 | - | - | | - |
| 3.6 | Sub Kelompok Substansi Perencanaan Penanaman Modal | - | - | - | - | | 1 |
| 3.6.1 | Analisis Dokumen Perizinan | - | - | - | - | | 1 |
| 3.6.2 | Pengelola Dokumen Perizinan | - | 1 | - | - | | - |
| 3.7 | Sub Kelompok Substansi Promosi Penanaman Modal | - | - | - | - | | 1 |
| 3.7.1 | Penyusun Promosi dan Kerjasama | - | - | - | - | | 1 |
| 3.7.2 | Pranata Promosi | - | 1 | - | - | | - |
| 3.8 | Sub Kelompok Substansi Perencanaan dan Pengembangan Promosi | - | - | - | - | | - |
| 3.8.1 | Analisis Penanaman Modal | - | - | - | - | | 2 |
| 3.8.2 | Pengelola Pengembangan Investasi | - | - | - | - | | 1 |
| 3.9 | Sub Kelompok Substansi Pengelola Data dan Informasi | - | 1 | - | - | | - |
| 3.9.1 | Analisis Sistem Informasi dan Jaringan | - | - | - | - | | 1 |

| No | Nama Jabatan | Jumlah SDM Yang Sudah Mengikuti Diklat (s.d semester 1 tahun 2022) | | | Rencana Jumlah SDM Yang Diusulkan Mengikuti Diklat (s.d Tahun 2024) | | |
|------------|---|--|------------|----------------|---|------------|----------------|
| | | Fungsional | Struktural | Teknis Lainnya | Fungsional | Struktural | Teknis Lainnya |
| 3.9.2 | Pengelola Data | - | - | - | - | | 1 |
| 3.9.3 | Pengelola Teknologi dan Informasi | | | | | | |
| 4 | Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu | - | - | - | - | | 2 |
| 4.1 | Sub Kelompok Substansi Pelayanan Penanaman Modal | - | - | - | - | | 1 |
| 4.1.1 | Analisis Dokumen Perizinan | - | 1 | - | - | | - |
| 4.1.2 | Pengelola Dokumen Perizinan | - | 1 | - | - | | - |
| 4.2 | Sub Kelompok Substansi Integrasi Pelayanan | - | - | - | - | | 3 |
| 4.2.1 | Analisis Tata Ruang | - | - | - | - | | 1 |
| 4.2.2 | Pengelola Pengendalian Pemanfaatan Ruang | - | 1 | - | - | - | - |
| 4.3 | Sub Kelompok Substansi Konsultasi dan Pengaduan | - | - | - | - | | 2 |
| 4.3.1 | Analisis Tata Ruang | - | - | - | - | | 1 |
| 4.3.2 | Pengelola Pengendalian Pemanfaatan Ruang | - | 1 | - | - | | - |
| 4.3.3 | Pengelola Data | - | - | - | - | | 3 |
| 4.3.4 | Pengelola Teknologi dan Informasi | - | - | - | - | | 5 |

Sumber : Anjab 2022 Bezzeting, DPMPTSP Kota Bogor 2022

Apabila kita melihat uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kualitas Sumber Daya Manusia yang ada di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu dilihat dari tingkat pendidikan, kepengkatan, cukup memadai dalam meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat. Sedangkan untuk pemenuhan Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu di Perlukan Sumber Daya Manusia dan untuk meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia diperlukan diklat jabatan dan diklat teknis. Diperlukan kemauan untuk lebih mengasah lagi kemampuannya dengan cara mengikuti pelatihan maupun pembelajaran mandiri guna

mencapai tingkat pengetahuan tertentu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugasnya.

Pada tahun 2021 Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu melaksanakan 6 Program, 9 Kegiatan dan 12 Sub Kegiatan. Secara Rinci dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 1.6 : Program dan Anggaran

| No | Program/Kegiatan | Anggaran |
|--|--|-----------------------------|
| PENDAPATAN | | Rp. 12.800.000.000 |
| 1 | Retrebusi IMB | Rp. 12.000.000.000 |
| 2 | Retrebusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Tenaga Kerja Asing | Rp. 400.000.000 |
| 3 | Retrebusi Penggunaan Pemanfaatan Tanah untuk Reklame (PPTR) | Rp. 100.000.000 |
| 4 | Retrebusi Pendapatan Menara | Rp. 300.000.000 |
| BELANJA LANGSUNG | | Rp. 6.162.388.770 |
| Program Penunjang Urusan Daerah Pemerintahan Kabupaten/ Kota | | |
| 1 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Rp. 1.743.831.826,- |
| 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Rp. 162.226.000,- |
| 3 | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Rp. 647.890.000,- |
| 4 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Rp. 20.000.000,- |
| Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | | |
| 5 | Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota | Rp. 100.000.000,- |
| 6 | Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | Rp. 100.000.000,- |
| Program Promosi Penanaman Modal | | |
| 7 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota | Rp. 64.025.000 |
| Program Pelayanan Penanaman Modal | | |
| 8 | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Rp. 2.251.953.944,- |
| Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | | |
| 9 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal | Rp. 94.380.000 |
| 10 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal | Rp. 227.262.000 |
| 11 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal | Rp. 50.820.000 |
| Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal | | |
| 12 | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Rp. 700.000.000,- |
| JUMLAH | | Rp. 18.962.388.770,- |

Perumusan Isu Strategis yang terdapat pada RPJMD Kota Bogor adalah sebagai berikut

1. Pembangunan Manusia Yang Berkeadilan
2. Penguatan Daya Saing Ekonomi Masyarakat Berbasis Pada Potensi Lokal
3. Pemanfaatan ruang dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.
4. Reformasi Birokrasi

Berikut Isu-isu Strategis yang memiliki sinergi terhadap tugas dan fungsi DPMPTSP Kota Bogor :

Tabel 1.7 : Isu – isu Strategis

| Isu Strategis Kota | Isu Strategis Dinas |
|--|---|
| 1. Penguatan Daya Saing Ekonomi masyarakat berbasis pada potensi lokal | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) 2. Menumbuhkan iklim investasi yang kondusif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 3. SinergitasPerencanaan penanaman modal dengan memfasilitasi kerjasama pelaku UMKM dengan PMA& PMDN |
| 2. Pemanfaatan ruang dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian pemanfaatan ruang dengan menerbitkan perizinan dan non perizinan yang mempertimbangkan daya dukung lahan dan daya dukung lingkungan. 2. Pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) serta peraturan zonasi. |

| | |
|------------------------|---|
| 3. Reformasi Birokrasi | 1. Pelayanan perizinan dan non perizinan secara Sederhana, Mudah, Akuntabel, Ramah Dan Tepat Waktu (SMART) dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) |
|------------------------|---|

Sumber : Hasil Analisis DPMPTSP Kota Bogor

C. Landasan Hukum

Penyusunan LKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bogor merujuk pada:

1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
4. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawaban Keuangan Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Pembangunan Daerah ;
10. Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Walikota Bogor Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor;
15. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor ;
16. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2018);
17. Peraturan Walikota Bogor Nomor 164 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor;
18. Peraturan Walikota Bogor Nomor 85 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perwali No 48 Tahun 2020 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan *)

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan LKIP Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor tahun 2021, adalah sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN

Berisi uraian tentang Latar belakang, Kewenangan, Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi, Landasan Hukum, dan Sistematika Penulisan.

2. BAB II RENCANA DAN TARGET KINERJA

Berisi gambaran singkat mengenai: uraian Rencana Strategis yang terdiri dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021, menguraikan sasaran-sasaran strategis beserta target yang akan dicapai berdasarkan anggaran yang disetujui.

3. BAB III PENGUKURAN KINERJA

Bab ini menyajikan uraian hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran-sasaran instansi, penjelasan atas capaian kinerja serta informasi lainnya yang berkaitan dengan kinerja serta membandingkan target dan realisasi kinerja termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan/ kegagalan, hambatan/ kendala dan permasalahan yang di hadapi serta langkah antisipatif yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor.

4. BAB IV EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Bab ini menyajikan uraian hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran-sasaran instansi, penjelasan atas capaian kinerja serta informasi lainnya yang berkaitan dengan kinerja serta membandingkan target dan realisasi kinerja termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan/ kegagalan, hambatan/ kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah antisipatif yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor.

5. BAB IV PENUTUP

Berisi tinjauan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor dan strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun yang akan datang serta Inovasi

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KERJA

A. Perencanaan

Perencanaan Strategis merupakan suatu rumusan perencanaan program dan kegiatan pembangunan yang berorientasi pada hasil yang hendak dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor telah menyusun Rencana Strategis. Rencana Strategis di susun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor. Rencana Strategis di susun untuk kurun waktu tahun 2019 – 2024. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor. Rencana Strategis juga memuat Visi, Misi, Strategis dan kebijakan. Program serta Kegiatan selama tahun 2019 sampai 2024.

B. Visi dan Misi

Visi suatu instansi berkaitan dengan pandangan kedepan kemana instansi tersebut harus dibawa atau diarahkan, agar dapat bekerja secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, kooperatif serta produktif.

Visi Kota Bogor adalah **“Terwujudnya Kota Bogor yang Ramah Keluarga”**. Berdasarkan Visi Kota Bogor tersebut, maka telah ditetapkan Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu **“Terwujudnya Pelayanan Publik yang Transparan, Akuntabel, dan Berbasis Teknologi”**, dengan Motto **“SMART (Sederhana, Mudah, Akuntabel, Ramah, dan Tepat Waktu)”**.

Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat tercapai dan berhasil dengan baik. Perumusan misi ini diharapkan agar seluruh anggota organisasi dan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dapat berpartisipasi

dan dapat mengenal peran organisasi lebih baik serta mendorong keberhasilannya. Dengan demikian misi merupakan suatu pernyataan mengenai hal yang harus dicapai oleh suatu organisasi pada masa yang akan datang. Perwujudan misi harus diupayakan oleh semua pihak yang berkepentingan dalam organisasi yang bersangkutan.

Misi Kota Bogor adalah :

1. Mewujudkan Kota yang Sehat
2. Mewujudkan Kota yang Cerdas
3. Mewujudkan Kota yang Sejahtera

Sesuai dengan tugas pokok fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor menjadi bagian dari misi Kota Bogor yang kedua. Sedangkan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor adalah: **Terwujudnya kemudahan berinvestasi.**

Sejalan dengan RPJMD untuk mencapai visi dan misi diatas ditetapkan pula tujuan, sasaran dan Program :

Tujuan Strategis Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah

1. Meningkatnya Nilai Investasi dan
2. Pelayanan Prima

C. Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

Indikator kinerja ditetapkan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan visi yang dilaksanakan. Indikator dan Target kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1. : Tujuan, Sasaran dan Indikator sesuai RENSTRA

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Target 2021 |
|----|---|--|---|-------------|
| 1 | Terwujudnya Tata Kelola Urusan Pemerintahan di bidang Penanaman Modal yang Efektif, Efesien dan Akuntabel | Meningkatnya Kualitas tata kelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Nilai AKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | BB |
| | | | Indek Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 3.6 |
| 2 | Terwujudnya Penanaman Modal yang mudah dan memiliki kepastian | Meningkatnya Daya Tarik Penanaman Modal di Kota Bogor | Realisasi Investasi | 2.53 |
| | | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Yang Prima dan Responsif. | Jumlah Perizinan dan non perizinan yang diterbitkan sesuai SOP | 85 |

Sumber: RENSTRA DPMPTSP 2019-2024

Dan Sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Nomor 050.45-304 tahun 2018 tentang Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Kota Bogor, Indikator Kinerja Utama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah : **Realisasi Investasi**

Tabel 2.2 : Tabel Tujuan, Sasaran dan Indikator Utama serta target tahun 2021 sesuai RPJMD Kota Bogor

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan | Target 2021 |
|----|---|--|---|-------------|
| 1 | Terwujudnya Tata Kelola Urusan Pemerintahan di bidang Penanaman Modal yang Efektif, Efesien dan Akuntabel | Meningkatnya Kualitas tata kelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Indek Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 3.6 |

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan | Target 2021 |
|----|---|--|---------------------|-------------|
| 2 | Terwujudnya Penanaman Modal yang mudah dan memiliki kepastian | Meningkatnya daya tarik penanaman modal di Kota Bogor | Realisasi Investasi | 2.53 |
| | | Meningkatnya Kualitas pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Yang Prima dan Responsif | | |

Sumber: RENSTRA DPMPTSP 2019-2024

Sejalan dengan itu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintuyaitu:

Tabel 2.3. : Tabel Indikator Kinerja Utama dan Target DPMPTSP serta target tahun 2021 sesuai RENSTRA

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Target 2021 |
|----|---|--|---|-------------|
| 1 | Terwujudnya Tata Kelola Urusan Pemerintahan di bidang Penanaman Modal yang Efektif, Efesien dan Akuntabel | Meningkatnya Kualitas tata kelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Nilai AKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | BB |
| | | | Indek Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 3.6 |
| 2 | Terwujudnya Penanaman Modal yang mudah dan memiliki kepastian | Meningkatnya Daya Tarik Penanaman Modal di Kota Bogor | Realisasi Investasi | 2.53 |
| | | Meningkatnya Kualitas Pelayana Perizinan dan Non Perizinan Yang Prima dan Responsif. | Jumlah Perizinan dan non perizinan yang diterbitkan sesuai SOP | 85 |

Sumber: RENSTRA DPMPTSP 2019-2024

D. Rencana Kinerja

Rencana Kegiatan Tahun 2021 dituangkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021. Selengkapnya Perjanjian Kinerja 2021 sebagai berikut:

Tabel 2.4. : Tabel Sasaran, Indikator dan Target Perjanjian Kinerja DPMPTSP Tahun 2021

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET |
|----|--|--|---------|--------|
| 1 | Meningkatnya Kualitas tata kelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 1. Nilai AKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Point | BB |
| | | 2. Indek Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Point | 3.6 |
| 2 | Meningkatnya Daya Tarik Penanaman Modal di Kota Bogor | 3. Realisasi Investasi | Triliun | 2.53 |
| 3 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Yang Prima dan Responsif. | 4. Jumlah Perizinan dan non perizinan yang diterbitkan sesuai SOP | Persen | 85 |

Sumber: RENSTRA DPMPTSP 2019-2024

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menurunkan tujuan dan sasaran kedalam 6 Program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
3. Program Promosi Penanaman Modal
4. Program Pelayanan Penanaman Modal
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Sedangkan indikator dan target program tahun 2021 sebagaimana table berikut :

Tabel 2.5 : Tabel Program, Indikator dan Target DPMPTSP Kota Bogor Tahun 2021

| NO | Program | Indikator | Target |
|----|---|---|--------|
| 1 | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tingkat Kota | BB |
| | | Indek Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 3.35 |
| 2 | Pengembangan Iklim Penanaman Modal | Nilai Investasi | 2.53 |
| 3 | Promosi Penanaman Modal | Nilai Investasi | 2.53 |
| 4. | Pelayanan Penanaman Modal | Prosentase Perizinan dan Non Perizinan yang di Terbitkan sesuai SOP | 85 |
| 5 | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | Prosentase Laporan Pengendalian Penanaman Modal yang Tersedia Tepat Waktu | 100 |
| 6 | Pengelolaan Data dan Sistim Informasi Penanaman Modal | Prosentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi dalam Sistim Informasi | 100 |

Sumber :Renstra DPMPTSP 2019-2024

Program dilaksanakan dalam kegiatan-kegiatan yang dianggarkan, di tentukan output dan penanggung jawabnya. Rencana Kegiatan tahun 2021 sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran secara terperinci adalah sebagai berikut.

Tabel 2.6 :Tabel Program, Kegiatan, Output , Jumlah Anggaran dan Penanggung Jawab Kegiatan di DPMPTSP tahun 2020

| No | Program/Kegiatan | Output | Anggaran | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---------------|-----------------------------------|
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | | | | |
| 1 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur | | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Prosentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Peralatan Kantor | 162.226.000 | Kasubag Perencanaan dan Pelaporan |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Meningkatnya Kinerja KPD | 1.743.831.826 | Kasubag Umum dan Kepegawaian |
| | | Meningkatnya Sarana dan Prasarana Operasional SKPD | | |
| | | Terpenuhinya Kebutuhan SKPD | | |
| 2 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur | | |
| | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Inventaris Kantor | 647.890.000 | Kasubag Umum dan Kepegawaian |

| No | Program/Kegiatan | Output | Anggaran | Penanggung Jawab |
|---|--|---|-------------|---|
| | | Terpeliharanya AC | | |
| | | Terpeliharanya Gedung dan Bangunan Kantor | | |
| | | Terpeliharanya Jaringan Internet | | |
| | | Terpeliharanya Kendaraan Inventaris Kantor | | |
| | | Terpeliharanya Komputer | | |
| | | Terpeliharanya Mesin Genset | | |
| | | Terpeliharanya Mesin Printer | | |
| | | Terpeliharanya Tabung Pemadam Kebakaran | | |
| 3 | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Prosentase Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD secara Tepat Waktu dan sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku | 20.000.000 | Kasubag Perencanaan dan Pelapora |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Tersusunnya Laporan Kinerja (LKIP, LPPD, RENJA, RENSTRA, RKPD) | | |
| | | Tersusunnya Laporan (Dokumen Zona Integritas dan Dokumen SPIP) | | |
| Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | | | | |
| 1 | Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota | Jumlah potensi dan peluang investasi yang terealisasi | | |
| | Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota | Tersedianya Kajian Peta Potensi dan Peluang Investasi | 100.000.000 | Kasi Perencanaan dan Pengembangan Promosi |
| 2 | Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | Tersedianya Kajian Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kota Bogor | | |
| | Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | Jumlah potensi dan peluang investasi yang terealisasi | 100.000.000 | Kasi Perencanaan dan Pengembangan Promosi |
| Program Promosi Penanaman Modal | | | | |
| 1 | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | Persentase Potensi dan Peluang Investasi yang telah dipromosikan | | |
| | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota | Publikasi melalui Media Cetak Regional | 64.025.000 | Kasi Promosi Penanaman Modal |
| | | Publikasi melalui Media Online | | |

| No | Program/Kegiatan | Output | Anggaran | Penanggung Jawab |
|--|--|---|---------------|--|
| | | Terlaksananya Sosialisasi Perizinan Non Perizinan dan Penanaman Modal | | |
| | | Terlaksananya Souvenir osialisasi | | |
| Program Pelayanan Penanaman Modal | | | | |
| 1 | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Penerima Layanan Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan | | |
| | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Terlaksananya Jumlah Pelayanan Publik di Mall Pelayanan Publik | 2.251.953.944 | Kasi Pembinaan dan Kajian Penanaman Modal |
| Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | | | | |
| 1 | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Laporan Investasi yang Tersedia Tepat Waktu | | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal | Jumlah Dokumen Berita Acara Pengawasan (BAP) dan Profil Pengawasan Perusahaan | 94.380.000 | Kasi Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal | Terlaksananya Pelaksanaan Workshop LKPM (Sosialisasi Bimtek) | 227.262.000 | Kasi Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal | Jumlah Dokumen Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan Profil Pemantauan Perusahaan | 50.820.000 | Kasi Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal |
| | | Jumlah Peserta Sosialisasi dan Bimbingan Teknis | | |
| Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dilaksanakan melalui Kegiatan | | | | |
| 1 | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah data dan Informasi Perizinan dan Non perizinan yang sudah terintegrasi | | |

| No | Program/Kegiatan | Output | Anggaran | Penanggung Jawab |
|----|---|--|-------------|-------------------------------|
| | Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistik Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Belanja Sewa Data Center (Co - Location) | 700.000.000 | Kasi Pengolahan dan Informasi |
| | | Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Mobile Apps Android/ IOS | | |
| | | Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Sistik Aplikasi Perkantoran | | |
| | | Pengembangan dan Pemeliharaan Platform Website | | |
| | | Pengembangan dan Pemeliharaan Sistik Aplikasi Perizinan SMART | | |
| | | Tersedianya Data dan Hasil Analisis Perizinan | | |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak - pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP Kota Bogor sesuai Peraturan Walikota Bogor Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya, setelah dilakukan perhitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (performance Gap) selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan Evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (performance improvement).

Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja DPMPTSP Kota Bogor Tahun 2021 dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut:

Tabel 3.1: Predikat Capaian Kinerja

| No | Predikat/Kategori | Capaian (Prosentase) | Keterangan |
|----|-------------------|----------------------|------------|
| 1 | Sangat Memuaskan | >90-100 | |
| 2 | Memuaskan | >80-90 | |
| 3 | Sangat Baik | >70-80 | |
| 4 | Baik | >60-70 | |
| 5 | Cukup | >50-60 | |
| 6 | Kurang | >30-50 | |
| 7 | Sangat Kurang | > 0-30 | |

Indikator Kinerja Utama sesuai dengan RPJMD yang menjadi tanggung jawab Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah **Nilai Investasi**. Sedangkan capaian Indikator Utama tahun 2021 sebagai berikut:

1. Realisasi Target Kinerja Tahun 2021

Capaian Indikator Utama DPMPTSP tahun 2021 rata-rata sebesar 63,87% termasuk pada kategori Baik. Sedangkan Pencapaian Indikator Kinerja Utama sesuai Renstra DPMPTSP disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.2 : Capaian Indikator Utama sesuai RPJMD Tahun 2021

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator | Target 2021 | Realisasi | Capaian |
|----|---|--|---|-------------|-----------------|---------|
| 1 | Terwujudnya Tata Kelola Urusan Pemerintahan di bidang Penanaman Modal yang Efektif, Efesien dan Akuntabel | Meningkatnya Kualitas tata kelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Nilai AKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | A | BB | 98 % |
| | | | Indek Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 3.6 | 3.37 | 93.6 % |
| 2 | Terwujudnya Penanaman Modal yang mudah dan memiliki kepastian | Meningkatnya Daya Tarik Penanaman Modal di Kota Bogor | Realisasi Investasi | 2.53 | 618.472.107.486 | 24,4 |
| | | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Yang Prima dan Responsif. | Jumlah Perizinan dan non perizinan yang diterbitkan sesuai SOP | 85 | 87.06 | 102 % |

Sumber : Bidang Penanaman Modal Tahun 2020 dan Laporan Hasil SKM

Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah berdasarkan penilaian Inspektorat Kota Bogor (BB) 79.11 dari target yang ditetapkan A (80)

2. Realisasi Target Kinerja Tahun 2021 dibandingkan dengan pencapaian tahun-tahun sebelumnya

Tabel 3.3: Capaian Indikator Utama di bandingkan dengan capaian Tahun 2019 sampai 2021

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET | REALISASI 2021 | REALISASI 2020 | REALISASI 2019 | |
|----|--|-------------------|---|------------------|----------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Meningkatnya Kualitas tata kelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 1 | Nilai AKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Point | A | BB | B | |
| | | 2 | Indek Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Point | 3.6 | 3.4 | 3.37 | 3.32 |
| 2 | Meningkatnya Daya Tarik Penanaman Modal di Kota Bogor | 3 | Realisasi Investasi | Triliun (Rupiah) | 2.53 | 618.472.107.486 | 1.603.215.590.165.12 | 2.641.381.312.523.23 |
| 3 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Yang Prima dan Responsif. | 4 | Prosentase Jumlah Perizinan dan non perizinan yang diterbitkan sesuai SOP | % | 85 | 87.06 | 50.07 | 92.74 |

Capaian Indikator Utama DPMPTSP tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 dan 2019 mengalami kenaikan, yaitu pada Indikator Nilai AKIP, Indek Kepuasan Masyarakat dan Prosentase Jumlah Perizinan dan non perizinan yang diterbitkan sesuai SOP. Sedangkan Realisasi Investasi mengalami penurunan karena adanya Pandemi Covid 19.

3. Realisasi Target Kinerja Tahun 2021 dibandingkan target jangka menengah (target akhir pada RENSTRA)

Tabel 3.4: Capaian Indikator Utama dibandingkan target jangka menengah RENSTRA

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET | REALISASI | TARGET TAHUN 2024 | |
|----|--|-------------------|---|------------------|-----------|-------------------|-----|
| 1 | Meningkatnya Kualitas tata kelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 1 | Nilai AKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Point | A | BB | A |
| | | 2 | Indek Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Point | 3.6 | 3.37 | 3.8 |
| 2 | Meningkatnya Daya Tarik Penanaman Modal di Kota Bogor | 3 | Realisasi Investasi | Triliun (Rupiah) | 2.53 | 618.472.107.486 | 2.6 |
| 3 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Yang Prima dan Responsif. | 4 | Prosentase Jumlah Perizinan dan non perizinan yang diterbitkan sesuai SOP | % | 85 | 87.06 | 100 |

Berdasarkan hasil pengukuran Kinerja Sasaran DPMPTSP, dapat dilihat bahwa Indikator Kinerja Sasaran 1 Indikator ke 2 dan Indikator Sasaran ke 3 telah tercapai melebihi target yang telah ditetapkan atau termasuk kategori baik.

4. Realisasi Target Kinerja Tahun 2021 dibandingkan dengan Standar Nasional

Sebagai Perangkat Daerah yang bukan merupakan penyelenggara urusan wajib pelayanan dasar DPMPTSP tidak memiliki SPM yang merupakan Standar Nasional secara khusus. Pencapaian Realisasi Investasi sebesar Rp. 600 milyar di Kota Bogor sedikit banyak menyumbang Realisasi Investasi secara Nasional. Adapun Realisasi Nasional dapat digambarkan sebagai berikut secara kumulatif, Realisasi Investasi selama periode Januari hingga Desember 2021 mencapai Rp. 901,02 triliun. Capaian ini melebihi 100,1 persen dari target yang diberikan secara khusus oleh Presiden RI Joko Widodo yaitu sebesar Rp.

900 triliun. Realisasi ini juga melebihi target 104,8 persen target pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar Rp858,5 triliun. (Dikutip dari: www.idntimes.com/business/economy/helmi/realisasi-investasi-2021-rp901-triliun-target-jokowi-terlampau)

5. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Realisasi Indikator Utama tahun 2021 dibandingkan dengan tahun sebelumnya meningkat sebagaimana dapat dilihat pada table berikut ;

Tabel 3.5 : Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2020 dan tahun 2021

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | Realisasi 2020 | Realisasi 2021 |
|----|--|---|----------------------|-----------------|
| 1 | Meningkatnya Kualitas tata kelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Nilai AKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | BB | BB |
| | | Indek Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 3.37 | 3.4 |
| 2 | Meningkatnya Daya Tarik Penanaman Modal di Kota Bogor | Realisasi Investasi | 1.603.215.590.165.12 | 618.472.107.486 |
| 3 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Yang Prima dan Responsif. | Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan sesuai SOP | 50.07 % | 87.06 % |

Sumber : Bidang Penanaman Modal Tahun 2021

Dalam Tabel diatas menjelaskan bahwa , Nilai Akip Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor 2020 ke 2021 , ada kenaikan 0.66 Point yaitu pada Tahun 2020 78.45 pada Tahun 2021 79.11. Pada Point Indeks Kepuasan Masyarakat juga mengalami kenaikan sebesar 0.03 Point, untuk Realisasi menurun drastic dikarenakan adanya Pandemi Covid 19, sedangkan untuk Jumlah Perizinan dan Non Perizinan mengalami kenaikan.

Nilai Realisasi Investasi, selama kurun waktu tahun 2021 Kota Bogor mencapai **Rp. 618.472.107.486,- atau 24.4 %** dari target (2.53 T). Jumlah ini mengalami Penurunan – 61 % dari tahun sebelumnya. Realisasi Investasi mengalami peningkatan setiap tahunnya, walaupun kenaikannya bervariasi, Namun pada dasarnya target Realisasi dapat tercapai.

Sedangkan Realisasi Investasi persektor setiap tahunnya bervariasi, masing-masing sektor tidak selalu diminati oleh Penanaman Modal. Untuk Realisasi Investasi persektor di Kota Bogor tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 memiliki pola, dimana Sektor Primer dan Sekunder hanya sebagian kecil, Sektor Tersier hampir mendominasi. Sektor Tersier yaitu Penanaman Modal yang bergerak di Bidang Jasa seperti Kontruksi, Perdagangan, Hotel dan Restoran dan sebagainya, Realisasi Investasi persektor selama periode 2020 dan 2021 dapat dicermati pada table dibawah ini.

Tabel 3.6 : Realisasi Investasi persektor di Kota Bogor tahun 2020 dan Tahun 2021

| NO | SEKTOR | 2020 | 2021 |
|----|--|--------------------|-------------------|
| | PRIMER | | |
| 1 | Tanaman pangan dan perkebunan | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Peternakan | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Kehutanan | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Perikanan | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Pertambangan | 5.611.500.000.00 | 2.089.940.659.00 |
| | SEKUNDER | | |
| 6 | Industri mkanan | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Industri tekstil | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Industri dari kulit dan imitasi | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Industri kayu | 0.00 | 0.00 |
| 10 | Industri kertas | 0.00 | 0.00 |
| 11 | Industri kimia dan farmsi | 140.900.000.00 | 0.00 |
| 12 | Industri karet dan plastik | 19.157.767.113.55 | 24.414.124.201.00 |
| 13 | Industri mineral dan logam | 0.00 | 0.00 |
| 14 | Industri logam, mesin dan elektronika | 0.00 | 0.00 |
| 15 | Industri instrument kedokteran,presisi, optic dan jam | 0.00 | 0.00 |
| 16 | Industri kendaraan bermotor dan alat transportasi lain | 23.040.005.83 | 392.920.002.00 |
| 17 | Industri lainnya | 0.00 | 0.00 |
| | TERSIER | | |
| 18 | Listrik, gas dan air | 0.00 | 0.00 |
| 19 | Konstruksi | 718,100,000.00 | 135.000.000.00 |
| 20 | Perdagangan dan reparasi | 74,158,040,291.07 | 70.523.859.234.00 |
| 21 | Hotel dan restoran | 463,654,584,185.03 | 33.344.460.210.00 |

| NO | SEKTOR | 2020 | 2021 |
|---------------|---|-----------------------------|---------------------------|
| 22 | Transportasi gudang dan komunikasi | 248,690,800,000.00 | 262.331.314.436.00 |
| 23 | Perumahan, kawasan industri dan perkantoran | 748,670,553,029.41 | 208.863.308.795.00 |
| 24 | Jasa lainnya. | 42,390,305,540.23 | 16.375.179.949.00 |
| JUMLAH | | 1,603,215,590,165.12 | 618.472.107.486.00 |

Sumber: Bidang Penanaman Modal Tahun 2021

Walaupun tidak ada pola yang khas, namun sektor tersier atau sektor jasa selalu ada realisasi investasi. Hal ini dimungkinkan karena karakteristik Kota Bogor, dimana potensi Kota Bogor didominasi oleh sektor jasa, dari perdagangan, transportasi, hotel dan restoran, perumahan maupun jasalainnya.

Demikian juga capaian program, meskipun target program mengalami kenaikan, realisasi dan capaian juga mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan kinerja program yang baik. Perbandingan capaian kinerja program tahun 2020 dan 2021 berdasarkan indikator Renstra dapat dilihat pada table berikut:

6. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

a. Efisiensi Sumber Daya Manusia

Dengan digunakannya Teknologi Informasi dalam Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal telah dilakukan efisiensi Sumber Daya Manusia sehingga seluruh Tugas dan Fungsi DPMPTSP dapat dilakukan personil SDM sejumlah 41 orang pegawai.

b. Efisiensi Sumber Daya Keuangan

Dalam hal keuangan dari jumlah anggaran sebesar Rp. 6.162.388.770,- dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi DPMPTSP melaksanakan penyerapan anggaran sebesar Rp. 5.759.338.144,- atau sebesar 97% sehingga didapatkan efisiensi sebesar 93%.

7. Analisa Capaian Program

Capaian Kinerja Program tahun 2021 berdasarkan Indikator Renstra dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.7: Capaian Indikator Program DPMPSTSP Tahun 2021

| NO | PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM | SATUAN | 2021 | | |
|----|---|--|----------------|--------|-----------------|-------------|
| | | | | Target | Realisasi | Capaian (%) |
| 1 | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tingkat Kota | Indeks | A | BB | 79.11 |
| | | Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur | % | 85 | 93.86 | 93.86 |
| 2 | Pengembangan Iklim Penanaman Modal | Nilai Investasi | Triliun Rupiah | 2.53 | 618.472.107.486 | 24,4 |
| 3 | Promosi Penanaman Modal | Nilai Investasi | Triliun Rupiah | 2.53 | 618.472.107.486 | 24,4 |
| 4 | Pelayanan Penanaman Modal | Prosentase Perizinan dan Non Perizinan yang di Terbitkan sesuai SOP | % | 85 | 87.06 | 87 |
| 5 | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | Prosentase Laporan Pengendalian Penanaman Modal yang Tersedia Tepat Waktu | % | 100 | 50 | 50 |
| 6 | Pengelolaan Data dan Sistin Informasi Penanaman Modal | Prosentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi dalam Sistin Informasi | % | 100 | 100 | 100 |

Data table menjelaskan bahwa semua indikator program telah mencapai target. Penjelasan masing-masing capaian indikator program sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, Indikator Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota adalah Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tingkat Kota, dengan target sesuai RPJMD sebesar 100%. Ini dapat dihitung dengan menghitung jumlah peralatan yang di

sediakan di banding jumlah prasarana yang di butuhkan kali seratus persen. Tahun 2021 pemenuhan ketersediaan prasarana ini mencapai 96.85 %, atau 97 % dari target yang ditetapkan.

- b. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
Indikator Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal adalah Nilai Investasi, dengan target sesuai RPJMD sebesar 2.53 Triliun ini dapat dihitung dengan Jumlah Prosentase Kegiatan Rata - rata Realisasi Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor dan Realisasi Pengadaan Inventaris Kantor. Ketersediaan prasarana ini mencapai 58.5 %
- c. Program Promosi Penanaman Modal.
Indikator Program Promosi Penanaman Modal adalah Nilai Investasi, dengan target sesuai RPJMD sebesar 2.53 Triliun
- d. Program Pelayanan Penanaman Modal.
Indikator Program Pelayanan Penanaman Modal adalah Prosentase Perizinan dan Non Perizinan yang di Terbitkan sesuai SOP, dengan target sesuai RPJMD sebesar 85 %
- e. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Indikator Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal adalah Prosentase Laporan Pengendalian Penanaman Modal yang Tersedia Tepat Waktu, dengan target sesuai RPJMD sebesar 100 %
- f. Program Pengelolaan Data dan Sistim Informasi Penanaman Modal
Indikator Program Pengelolaan Data dan Sistim Informasi Penanaman Modal adalah Prosentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi dalam Sistim Informasi

Selanjutnya masing-masing pengukuran capaian kegiatan dapat di cermati sebagai berikut:

a. Realisasi Keuangan

Realisasi keuangan menggambarkan penyerapan dana yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan. Lebih rinci realisasi keuangan dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.8 : Realisasi Pendapatan dan Belanja Keuangan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021

| No | Uraian | Anggaran | Realisasi | Sisa | Persentase serapan |
|----|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| | PENDAPATAN | 12,800,000,000 | 16.989.429.393 | 21.542.500 | 132.73 |
| 1 | Izin Mendirikan Bangunan | 12,000,000,000 | 16.036.085.595 | - | 133.63 |
| 2 | Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) | 400,000,000 | 378.457.500 | 21.542.500 | 94.61 |
| 3 | Penggunaan Pemanfaatan Tanah untuk Reklame (PPTR) | 100,000,000 | 138.528.955 | - | 138.53 |
| 4 | Retrebusi Pendapatan Menara | 300 000.000 | 436.357.343 | - | 145.45 |
| | BELANJA DAERAH | 15.062.042.079 | 14.552.541.159 | 509.500.920 | 96.26 |
| | Belanja Pegawai | 8.899.653.309 | 8.793.203.015 | 106.450.294 | 98.80 |
| 1 | Gaji dan Tunjangan | 8.899.653.309 | 8.793.203.015 | 106.450.294 | 98.80 |
| | Belanja | 6.162.388.770 | 5.759.338.144 | 403.050.626 | 93 |
| 1 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 1.743.831.826 | 1.598.122.758 | 145.709.068 | 91.64 |
| 2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 162.226.000 | 160.000.000 | 2.226.000 | 98.63 |
| 3 | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 647.890.000 | 638.917.521 | 8.972.479 | 98.62 |
| 4 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 20.000.000 | 19.750.000 | 250.000 | 98.75 |
| 5 | Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota | 100.000.000 | 97.342.000 | 2.658.000 | 97.34 |
| 6 | Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | 100.00.000 | 92.002.000 | 7.998.000 | 92.00 |
| 7 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal | 94.380.000 | 7.861,100 | 86.518.900 | 8.33 |
| 8 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal | 227.262.000 | 169.276.900 | 57.985.100 | 74.49 |

| No | Uraian | Anggaran | Realisasi | Sisa | Prosentase Serapan |
|----|--|---------------|---------------|------------|--------------------|
| 9 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal | 50.820.000 | 9.569.936 | 41.250.064 | 18.83 |
| 10 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota | 64.025.000 | 59.325.000 | 4.700.000 | 92.66 |
| 11 | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | 2.251.953.944 | 2.230.593.929 | 21.360.015 | 99.05 |
| 12 | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | 700.000.000 | 676.577.000 | 23.423.000 | 96.65 |

Sumber :Subag Keuangan DPMPTSP tahun 2021 (LRA 2021)

Realisasi keuangan kegiatan rata-rata mencapai 99 %. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan tahun 2021 telah direncanakan dengan baik sehingga dalam pelaksanaannya dapat direalisasikannya lebih dari 99 %.

B. Realisasi dan Capaian Kinerja Program dan Kegiatan

a. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Capaian Indikator Utama DPMPTSP tahun 2021 telah melampaui target. Sedangkan Realisasi Indikator Utama tahun 2021 dibandingkan dengan tahun sebelumnya meningkat sebagaimana dapat dilihat pada table berikut;

Tabel 3.9 : Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2020 dan tahun 2021

| NO | Program 2020 | Indikator Program 2020 | 2020 | | | Program 2021 | Indikator Program 2021 | 2021 | | |
|----|--|---|--------|----------------------|---------|--|---|--------|-----------------|---------|
| | | | Target | Realisasi | Capaian | | | Target | Realisasi | Capaian |
| 1 | Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal | Nilai Investasi | 2.5 | 1.603.215.590.165.12 | 64 % | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tingkat Kota | A | BB | 79.11 |
| | | | | | | | Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur | 85 | 93.86 | 93.86 |
| 2 | Pelayanan Administrasi Perkantoran | Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur | 100 | 96.85 | 97 % | Pengembangan Iklim Penanaman Modal | Nilai Investasi | 2.53 | 618.472.107.486 | 24,4 |
| 3 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur | 75 | 58.5 | 58.5 % | Promosi Penanaman Modal | Nilai Investasi | 2.53 | 618.472.107.486 | 24,4 |
| 4. | Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Nilai AKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | BB | BB | 78.45 % | Pelayanan Penanaman Modal | Prosentase Perizinan dan Non Perizinan yang di Terbitkan sesuai SOP | 85 | 87.06 | 87 % |

| NO | Program 2020 | Indikator Program 2020 | 2020 | | | Program 2021 | Indikator Program 2021 | 2021 | | |
|----|--------------|------------------------|--------|-----------|---------|---|--|--------|-----------|---------|
| | | | Target | Realisasi | Capaian | | | Target | Realisasi | Capaian |
| 5 | | | | | | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | Prosentase Laporan Pengendalian Penanaman Modal yang Tersedia Tepat Waktu | 100 | 50 | 50 |
| 6 | | | | | | Pengelolaan Data dan Sistin Informasi Penanaman Modal | Prosentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi dalam Sistin Informasi | 100 | 100 | 100 |

BAB IV

PENUTUP

A. Permasalahan dan Kendala yang Berkaitan dengan Kinerja

Memperhatikan pengukuran dan hasil evaluasi serta analisis kinerja pada BAB sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Bogor telah dapat melaksanakan rencana kinerja yang telah ditetapkan. Adapun hasil-hasil pengukuran kinerja menunjukkan hasil yang menggembirakan. Dengan demikian telah terpenuhi kewajiban lembaga ini yaitu fungsi pelayanan teknis operasional dan teknis administratif di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bogor. Hal ini merupakan satu hasil langkah kerja Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor dalam rangka memberikan Pelayanan terbaiknya kepada Masyarakat dan Pelaku Usaha.

Namun demikian dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala antara lain:

1. Banyaknya Regulasi Perizinan dari Pemerintah Pusat, yang Implementasinya di Daerah belum sepenuhnya dapat dilaksanakan seutuhnya.
2. Adanya Pandemi Covid 19 yang menyebabkan Struktur Anggaran Berubah – rubah, seperti adanya Refocusing Anggaran, sehingga Pelaksanaan Kegiatan Tidak sesuai dengan Rencana yang telah di Tetapkan.

B. Strategi Pemecahan Masalah Untuk Masa Mendatang

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja yang telah dicapai serta untuk memperbaiki kekurangan, maka Strategi Pemecahan Masalah, yaitu :

1. Untuk meningkatkan wawasan / pengetahuan, keterampilan dan kemampuan Pegawai di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu diikuti sertakan Diklat yang

diselenggarakan oleh Kota Bogor sendiri, pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

2. Karena DPMPTSP telah memberikan pelayanan secara elektronik, harus dijamin bahwa pelayanan elektronik yang digunakan memenuhi standar dan aman, tetap mengikuti perkembangan teknologi dengan mengembangkan berbagai bentuk Pelayanan Elektronik.
3. Melaksanakan Bimbingan Teknis, Pelaporan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) kepada Pelaku Usaha di Kota Bogor, dalam rangka Meningkatkan Realisasi Investasi di Kota Bogor.
4. Melaksanakan Kegiatan Promosi Penanaman Modal, agar dapat menarik para Investor untuk ber Investasi di Kota Bogor, sesuai Potensi yang dimiliki.

Diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini, dapat bermanfaat bagi Pemerintah Kota Bogor pada umumnya dan Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor pada khususnya untuk :

1. Acuan atau pertimbangan bagi Pemerintah Kota Bogor untuk mengembangkan dan menunjukkan keberadaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor.
2. Mendorong Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah dibidang pelayanan perizinan secara baik dan benar berdasarkan *Good Governance* dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kebijaksanaan yang transparan serta dapat dipertanggung jawabkan.
3. Menjadikan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor yang Akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien dan efektif, dan dengan senantiasa cepat tanggap terhadap aspirasi masyarakat dan kebutuhan peningkatan kemampuan pegawai;
4. Sebagai bahan masukan (*input*) maupun umpan balik (*feed back*) bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam upaya meningkatkan

kinerja Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor.

Terselenggaranya Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor tentu tidak akan terwujud dengan baik tanpa kontribusi dari pihak-pihak terkait. Untuk itu saran dan masukan akan sangat berharga untuk membangun pelayanan terpadu satu pintu yang lebih baik.

LAMPIRAN

1. Rencana Kegiatan Anggaran Tahun 2021
2. Rencana Kinerja Tahun 2021
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2021
4. Laporan Triwulan Capaian Kinerja Tahun 2021
5. Capaian Kinerja Program
6. Capaian Kinerja Sasaran
7. Capaian Kinerja Kegiatan